

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi auditor di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan nasional dan internasional, dalam menjalankan profesinya, auditor harus bekerja secara profesional yaitu harus menjunjung tinggi kode etik profesi dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Claraini, 2017). Auditor yang profesional dapat dilihat dari hasil kinerjanya. yakni dalam menjalankan perintah atasan yang telah diberikan dan sesuai dengan kode etik sebagai auditor (Widhi, Saputro Nugroho & Setyawati, 2015). Sehingga secara tidak langsung tingkat profesionalitas seorang auditor berpengaruh pada kinerja auditor itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada Kinerja Auditor Pemerintahan. Kinerja auditor pemerintah adalah hasil kerja dari tindakan atau perilaku auditor secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya (pemeriksaan) sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam kurun waktu tertentu (Claraini, 2017). Auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar yang berlaku sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dapat dipertanggungjawabkan (Goldwasser, 1993). Auditor pemerintah memiliki pertanggungjawaban terhadap rakyat.

Salah satu kasus di Jawa Timur yaitu terdapat dugaan korupsi pembangunan gedung untuk mess santri di Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim mengancam akan menggugat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). Audit yang dikeluarkan BPKP itu dinilai tidak benar dan keabsahannya diragukan. Gugatan itu akan dilayangkan oleh dua orang tersangka yaitu Nur M Herlambang dan Bagus Sutarto melalui pengacaranya Arda Netadji. Arda menjelaskan, gugatan tersebut akan disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Pekan depan kami akan mengajukan gugatan ini," ujarnya dengan yakin, Senin (22/6/2015). Dia menjelaskan, salah satu yang menjadi ganjalan besar dan akan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke PTUN, adalah keabsahan dari hasil audit yang dikeluarkan BPKP sebab berbeda dengan yang dikeluarkan BPK. "BPKP dan BPK sama sama mengeluarkan ahli, dan BPK mengatakan tidak menemukan adanya potensi kerugian negara dalam pembangunan gedung di Kemenag Jatim, karena dinilai tidak menyimpang," kilah Arda. Arda menyampaikan bahwa hasil audit BPK lebih dulu luar dibandingkan dengan BPKP. Namun penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim masih memproses kasus tersebut dan tidak menghiraukan hasil audit BPK. Penyidik, lebih berpedoman pada hasil audit BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara dalam proyek pembangunan Gedung Mess Santri. Kepala BPKP Jatim Hotman Napitupulu menyatakan, bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan dari pihak tersangka. Hotman berpendapat bahwa perhitungan yang telah dilakukan BPKP sudah sesuai dengan dokumen dan data-data yang diberikan oleh penyidik Kejati Jatim. "Perhitungan yang kami (BPKP) lakukan sesuai dengan dokumen dan data yang diberikan penyidik Kejati Jatim dan ahli kontruksi yang mengecek fisik gedung. Apa yang kami kerjakan, semuanya sesuai dengan bukti, dan kami siap menghadapi gugatan itu," tegas Hotman Napitupulu. Hotman menambahkan, perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP sangat

netral. BPKP tidak punya kepentingan dengan pihak manapun terlebih lagi sampai memihak salah satu. “BPKP bertugas secara independen (bebas dan tidak ada intervensi pihak manapun) dan profesional,” kata Hotman. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi proyek gedung mess santri yang mendapat anggaran Rp14,5 miliar. Namun dalam pelaksanaan proyek diduga terjadi tindakan korupsi karena ada beberapa bangunan sudah mulai retak. Nilai kerugian negara dari dugaan korupsi tersebut mencapai Rp2,7 miliar. Dalam kasus ini, Kejati Jatim telah menetapkan tersangka, yakni Abdul Hakim selaku PPK, mantan Kasi Kurikulum Kemenag Jatim, Nur M Herlamban dan Bagus Sutarto selaku rekanan proyek, Abdul Aziz dan Yongki Suyono selaku konsultan pengawas. <https://daerah.sindonews.com/berita/1015662/23/tersangka-korupsi-di-jatim-ancam-gugat-bpkp?showpage=all>

Menurut Claraini (2017) independensi merupakan suatu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik, karena tanggung jawab auditor bukan sekedar untuk memberikan opini semata. Ketika auditor melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan akan menimbulkan berbagai sorotan dari berbagai pihak dan dapat diproses secara hukum. Oleh sebab itu, penting bagi seorang auditor untuk menjaga etika dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Komitmen organisasi juga dianggap penting dalam menentukan keberhasilan serta kinerja auditor, hal ini terjadi karena komitmen organisasi mencerminkan sejauh seorang auditor mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadinya (Claraini, 2017). Komitmen lebih kepada kesadaran pribadi, dimana seorang auditor dapat memberikan kontribusi aktif dan loyalitas untuk

mencapai tujuan perusahaan yang dipandang sebagai tujuan bersama. Keberhasilan dan kinerja auditor dapat dapat ditentukan oleh komitmen organisasi.

Menurut Noch dan Winata (2019) gaya kepemimpinan dan *good governance* juga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Didukung dari segi pemahaman *good governance* apabila seorang auditor yang memahami *good governance* secara benar juga akan mempengaruhi perilaku profesional akuntan dalam berkarya dengan orientasi pada kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuan.

Gaya kepemimpinan juga dianggap penting dalam meningkatkan kinerja auditor. Ketika auditor memperlihatkan gaya kepemimpinannya kedalam situasi tertentu, melalui ucapan, sikap dan tingkah laku, mereka akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Adi Putra dan Ariyanto, 2016). Pentingnya gaya kepemimpinan dalam diri auditor dapat mendorong kinerja auditor menjadi lebih baik dalam menyelesaikan tugas audit. Jika seorang pemimpin mampu memimpin bawahannya dengan cara yang baik, maka auditor akan terpacu untuk untuk bekerja dengan maksimal dan dapat meningkatkan kinerjanya.

Independensi auditor telah terbukti dapat mempegaruhi kinerja auditor. Sebagai contoh, pada Tahun 2019 salah satu auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Rochmadi Saptogiri ditetapkan sebagai tersangka. Rochmadi dihukum atas kasus penerimaan suap atas pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sitompul, 2019). Independensi auditor dibutuhkan untuk memberikan opini secara objektif.

Topik tentang pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan *good governance* terhadap kinerja auditor sudah beberapa kali diteliti sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (Widhi dan Setyawati, 2015). Hapsari dan Fathmaningrum (2020) menyatakan bahwa Independensi menjadi salah satu pengaruh kinerja auditor pemerintah. Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja fungsional auditor pemerintahan (Sari, Kurrohman dan Adriana, 2016). Putra dan Ariyanto (2016) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja audit. Berdasarkan fenomena diatas masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh seorang auditor pemerintahan dikantor Badan Pengawasan dan Keuangan Jawa Timur sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan Dan Pemahaman *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Adakah pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah?
4. Adakah pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah
2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah
3. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah
4. Mengetahui pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pihak-pihak yang membutuhkan antara lain:

1. Bagi peneliti
Untuk menambah wawasan yang lebih mendalam tentang independensi, komitmen kerja, pemahaman *good governance* dan kinerja auditor.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk bahan penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat
menambah pengetahuan terkait independensi, komitmen kerja, pemahaman *good governance* dan kinerja auditor.

